

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akuntabilitas lembaga publik di tingkat pusat dan daerah tercermin dari semakin berkembangnya sektor publik di Indonesia saat ini. Menurut Lestari (2020), pemerintah daerah dapat bermasalah dengan akuntabilitas publik jika tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, terpercaya, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Meningkatnya minat terhadap pelaksanaan tanggung jawab publik menyebabkan adanya usulan bagi pengurus di organisasi pemerintah untuk memberikan data kepada masyarakat umum, salah satunya adalah data dalam laporan moneter. Dengan cara ini, kerangka data memainkan peran penting dalam bekerja secara hierarkis dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Simanjuntak (2019) memaknai pemerintahan yang baik merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam menyelesaikan tugas pembinaan negara sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kemajuan administrasi moneter provinsi secara langsung mempengaruhi hasil kemerdekaan teritorial dan memberikan komitmen yang besar terhadap upaya untuk mengakui tanggung jawab. Sebagai tanda tanggung jawab, badan legislatif setempat diharapkan menyiapkan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Roviyanti (2020) berpendapat bahwa sejak pelaksanaan kemerdekaan daerah, setiap pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Negara Bagian diharapkan untuk mendistribusikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab menjelang akhir tahun keuangan dan harus dievaluasi melalui Tinjauan Moneter. Organisasi (BPK). Namun masih banyak temuan kajian dari Badan Pemeriksa Moneter (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah yang diberikan oleh masyarakat miskin dalam memahami pedoman dan masih banyak kelainan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan review terhadap laporan moneter pemerintah. Permintaan masyarakat terhadap administrasi yang baik semakin meningkat.

Arfianti (2021) menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk tanggung jawab yang mencapai misi organisasi melalui media pertanggungjawaban yang teratur

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah mengenai kegiatan keuangan instansi pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai auditor intern pemerintah berperan membantu pemerintah pusat/daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabupaten yang berpartisipasi dalam melaksanakan otonomi daerah dengan lokasi daerahnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, Kabupaten Jepara secara mandiri melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yang di bawah BPKP Provinsi Jawa Tengah. Suatu kabupaten/kota dapat dinilai berdasarkan keberhasilannya dalam melakukan kinerja pelaksanaan otonomi daerah yang dapat direfleksikan dari nilai optimalisasi penerimaan daerah setiap kabupaten/kota. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) yang terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan daerah yang sudah disetor/ditetapkan. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) yang terealisasi tahun 2022 sebesar Rp

60.118.694.142 berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi OPAD Atas Potensi Pajak Hasil Evaluasi Tahun 2022

Kabupaten Jepara	Rp	66.326.543
Kabupaten Kudus	Rp	17.789.665.959
Kabupaten Boyolali	Rp	754.614.143
Kabupaten Sukoharjo	Rp	41.508.087.497
Total	Rp	60.118.694.142

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp 60.118.694.142 atau mencapai 1.278,58% dari target tahun 2022. Aktivitas pengawasan yang dilakukan pada Tahun 2022 adalah Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp 66.326.543 dan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebesar Rp 754.614.143 serta Monitoring Tindak Lanjut atas Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tergolong belum maksimal.

Evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri dan Kota Tegal. Dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2022 atas 5 (lima) Pemda terdapat nilai perencanaan penganggaran yang tidak efisien sebesar Rp284.147.039.325 dan tidak efektif sebesar Rp1.304.180.178.805. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Jepara belum efektif dan

efisien, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jepara dituntut untuk melakukan evaluasi perencanaan pembangunan dan penganggaran APBD.

Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik adalah Instansi (Pemda) yang telah dilakukan *Fraud Risk Assessment* (FRA) sehingga memiliki strategi pencegahan korupsi yang baik. BPKP Provinsi Jawa Tengah (2023) menjelaskan *Fraud Risk Assessment* merupakan kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi dan menganalisis probabilitas maupun dampak signifikan bila suatu praktik korupsi terjadi serta mengevaluasinya dalam rangka menentukan respon yang tepat. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2022 sebanyak 6 (enam) Pemda diperoleh dari hasil pengawasan Bidang Investigasi melalui kegiatan penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) pada:

Tabel 1.2
Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
4	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
5	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa hasil temuan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dari 6 (enam) pemerintah daerah, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara memiliki efektivitas pengendalian

korupsi baik tahun 2022. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jepara dalam hal ini dituntut untuk meningkatkan/mempertahankan capaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan koordinasi untuk menggali potensi penugasan fasilitasi pengukuran indeks efektivitas pencegahan korupsi, meningkatkan koordinasi dengan Bidang APD agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan meningkatkan kompetensi pegawai bidang Investigasi melalui PPM terkait materi IEPK.

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara disajikan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Tabel 1.3
Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah penuh)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Jumlah Aset Lancar	211.986.770.978,75	328.770.146.494,61
Jumlah Investasi Jangka Panjang	196.068.758.934,08	185.673.635.335,61
Jumlah Aset Tetap	5.988.581.080.443,19	5.990.226.995.205,73
Jumlah Dana Cadangan	20.000.000.000,00	-
Jumlah Aset Lainnya	74.288.187.178,78	169.757.675.978,90
JUMLAH ASET	6.490.924.797.534,80	6.674.428.413.014,89
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	36.263.556.713,78	45.133.876.471,73
Ekuitas	6.454.661.240.821,02	6.629.294.536.543,16
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	6.490.924.797.534,80	6.674.428.413.014,89

Sumber: Neraca Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023.

Berdasarkan tabel 1.3 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara per Desember 2022 dan 2021 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memperoleh hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi pada tahun 2022 jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jepara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 183.503.615.480,09. Penurunan aset yang cukup signifikan disebabkan penurunan aset lancar sebesar

Rp 116.783.375.515,86 yang dijelaskan dari pada tahun 2022 sebesar Rp 211.986.770.978,75 dan pada tahun 2021 sebesar 328.770.146.494,61. Jadi dijelaskan bahwa masih terdapat kecenderungan masalah kualitas laporan keuangan Kabupaten Jepara per Desember 2022 yang perlu ditekankan pada perolehan aset lancar.

Faktor pertama yang mempengaruhi sifat laporan moneter adalah penggunaan pedoman pembukuan berbasis akumulasi. Andini (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan akumulasi berdasarkan Prinsip Pembukuan Pemerintah (SAP) merupakan salah satu program perubahan administratif, dimana otoritas publik yang selama ini belum terlalu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan moneter, diharapkan dapat menyampaikan laporan keuangan yang lengkap dan dapat diandalkan. melaporkan kepada semua klien. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan oleh informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya.

Research gap berkaitan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu penelitian Holle (2019), Ikyarti (2019), Putri (2019), Febri (2019), Hasibuan (2019), Lestari (2020), Rahayu (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Pavitasari (2019), Suhardjo (2019), Elfauzi (2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Hadiyati (2019) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berguna untuk penegasan kualitas (*affirmation of quality*) sangat penting dalam membantu tanggung jawab kepala daerah untuk memahami peningkatan kemampuan administratif organisasi pemerintah provinsi. Kerangka pengendalian internal badan publik (*internal audit*) di pelayanan negara/yayasan/legislatif daerah mengaudit laporan keuangan dan pelaksanaan untuk menjamin kualitas yang tidak tergoyahkan dari data yang diperkenalkan sebelum disajikan oleh pendeta/perintis/wakil pemimpin/pejabat/pimpinan balai kota kepada pihak terkait. Alasan dilakukannya survei terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan kepastian terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan kerangka pengendalian internal yang memadai dan diberikan dalam memahami prinsip-prinsip pembukuan.

Research gap berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu penelitian Holle (2019), Pavitasari (2019), Ikyarti (2019), Putri (2019), Febri (2019), Suhardjo (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Hadiyati (2019), Lestari (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah motivasi kerja. Wirakusuma (2019) berpendapat bahwa motivasi kerja merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang, karena tanpa adanya motivasi untuk bekerja atau motivasi untuk memperoleh tujuan tertentu, maka sulit untuk menyelesaikan ataupun memperoleh tujuan yang diinginkan. Motivasi merupakan faktor penting dalam setiap pegawai untuk mencapai hasil kerja yang efektif. Motivasi sebagai faktor yang memberikan dorongan atau semangat kepada seseorang untuk mengambil suatu keputusan yang dikehendaki. Motivasi kerja di dalam pemerintahan lebih diarahkan untuk memberikan kekuatan dan dorongan dalam diri seorang pegawai yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik. Pemberian motivasi yang tepat kepada para pegawai akan menghasilkan kinerja yang optimal untuk melayani publik.

Research gap berkaitan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu penelitian Holle (2019), Pratama (2019), Wirakusuma (2019), Arfianti (2021) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Maksyur (2019), Rahmadani (2020) menyatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Hendri (2020) berpendapat bahwa dalam pengelolaan keuangan yang baik, organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki SDM yang ahli di bidangnya, memiliki landasan pendidikan dalam

pembukuan, telah mengenyam pendidikan dan pelatihan, serta memiliki wawasan di bidang keuangan. Hal ini penting untuk menjalankan kerangka yang berhubungan dengan pembukuan di pemerintahan. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan tata kelola organisasi juga dibutuhkan oleh entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Research gap berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu penelitian Pavitasari (2019), Pratama (2019), Febri (2019), Elfauzi (2019), Hasibuan (2019), Hendri (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Hadiyati (2019), Putri (2019), Suhardjo (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Simanjuntak (2019), implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan kerangka administrasi keuangan daerah berbasis inovasi data yang dapat membantu lembaga legislatif daerah dalam menghasilkan data yang penting, cepat, tepat, lengkap dan dapat dipercaya.

Research gap berkaitan dengan pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu penelitian Ikyarti (2019), Simanjuntak (2019), Lestari (2020), Rahayu (2020),

Roviyanti (2020), Arfianti (2021) menyatakan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Aryani (2019), Andini (2020) menyatakan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berkaitan dengan pokok permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jepara dan didukung dari beberapa perbedaan hasil penelitian, maka penelitian ini bermaksud mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Holle (2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua).

Perbedaan penelitian yang pertama yaitu penambahan variabel independen kompetensi sumber daya manusia dan implementasi sistem informasi manajemen daerah. Menurut Pavitasari (2019) dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bagus tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang melaksanakannya harus berkompeten tidak hanya pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi tetapi dari segala latar belakang pendidikan dan menurut Ikyarti (2019) dengan adanya implementasi sistem informasi manajemen daerah maka dalam pembuatan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Perbedaan yang kedua terletak pada obyek penelitian, penelitian sebelumnya pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Papua, sedangkan penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara dan beberapa perbedaan penelitian, sehingga peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, MOTIVASI KERJA, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA).**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), motivasi kerja (X_3), kompetensi sumber daya manusia (X_4) dan implementasi sistem informasi manajemen daerah (X_5) dengan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah (Y).
2. Penelitian ini difokuskan pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan pokok permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah, maka dinyatakan rumusan masalah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
5. Apakah implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah kualitas laporan keuangan pemerintah, maka dinyatakan tujuan penelitian:

1. Menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
5. Menganalisis pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian, diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan berkaitan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian intern, motivasi kerja, kompetensi sumber daya manusia dan implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.